

Kemampuan Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah

Lutfi Muta'ali

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

*Email koresponden: luthfimutaali@ugm.ac.id

Direvisi: 2019-02-04. Diterima: 2019- 09-07
©2019 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta mencari pola hubungan dan dimensi spasial serta faktor-faktor penentu dan relasi diantara keduanya sebagai dasar perumusan kebijakan. Dengan analisis kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan kondisi tingkat kemandirian keuangan yang cukup dengan kesejahteraan masyarakat yang rendah. Alokasi belanja untuk sosial masih sangat rendah (2%) sehingga sulit diharapkan peningkatan kesejahteraan dari keuangan daerah. Hasil analisis varian menunjukkan tingkat perbedaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat antara Kabupaten dan Kota dan juga hubungan erat antara indikator keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi keuangan daerah akan diikuti dengan tingginya kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penerimaan per penduduk (X1), tingkat kemandirian daerah (X2) dan efektivitas belanja pembangunan (X5). Tipologi daerah mengelompok pada Tipe I (keuangan tinggi, kesejahteraan tinggi) dan IV (keuangan rendah dan kesejahteraan rendah) sebanyak 77% dan dijadikan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan

Kata Kunci : Keuangan daerah, Kesejahteraan masyarakat, variasi spasial.

Abstract This research aims to identify the local financial potential and the social welfare, and look for patterns of relationships and spatial dimensions as well as determinants and relations between the two as a basis for policy formulation. With quantitative analysis, the results of the study indicate the condition of sufficient level of financial independence with the welfare of the community low. The allocation of expenditure for social affairs is still very low (2%) so it is difficult to expect an increase in welfare from local finances. The results of the analysis of variance indicate the level of local financial disparity and the welfare of the community between districts and cities and also the close relationship between local financial indicators and social welfare. The higher regional finances will be followed by high social welfare. Factors considered to have a significant effect on social welfare are income per population (X1), regional independence (X2) and the effectiveness of development spending (X5). Regional typologies cluster in Type I (high finance, high welfare) and IV (low finance and low welfare) as much as 77% and serve as a basis for determining development priorities

Keywords : Local Finance, Social Welfare, spatial variation.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kapital dan sumber daya buatan secara menyeluruh, terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat secara berke-

lanjutan (Muta'ali, 2012).

Terjadinya krisis ekonomi pada semua sektor membuat nilai mata uang rupiah terus terpuruk, daya beli (*purchasing power*) masyarakat melemah (Todaro, 2000). Dampak krisis yang sampai saat ini masih dirasakan sudah menyentuh ke semua sektor (multidimensi). Berlarut-larutnya krisis ini dipicu oleh antara lain lemahnya kinerja aparatur pemerintah

dan banyaknya kebijakan yang tidak tepat sasaran, misalnya terjadinya *missallocation* dalam penganggaran daerah. Pada gilirannya menjadikan kinerja pembangunan tidak optimal. Fenomena ini menimbulkan pemikiran bahwa dibutuhkan suatu penelitian atau kajian dengan pendekatan analisis keterkaitan antara struktur penganggaran daerah dengan tipologi permasalahan daerah untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan wilayah, otonomi daerah memberi kesempatan kepada masing-masing daerah untuk lebih menampilkan karakteristik dan potensi lokal. Perbedaan karakter yang ada pada tiap-tiap daerah menuntut adanya suatu manajemen pembangunan sumber daya yang mampu melihat keunggulan dan kemampuan suatu daerah yang pada gilirannya menjadikannya sebagai asset pembangunan atau produk unggulan. Dari sisi lain diharapkan mampu menjadikan kekurangannya untuk berinovasi dan berkreasi serta menjalin kerja sama dengan daerah lain. Namun yang sering terjadi kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada tipologi wilayah dan standar pelayanan minimal yang merupakan indikator kinerja pembangunan. Hal ini mempunyai implikasi kepada kebijakan pembangunan yang kurang tepat sasaran (efektif) dan efisien serta hasil yang kurang optimal. Sesuai dengan itu maka pembangunan wilayah diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta lestariannya pemanfaatan sumber daya yang lain.

Seiring dengan pemberlakuan UU tentang Pemerintahan Daerah maka substansi paradigma peyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Di era otonomi daerah, struktur anggaran daerah (APBD) mengacu pada pendapatan masing-masing daerah sehingga tiap-tiap daerah, dimana struktur APBD-nya akan berbeda dengan daerah lain tergantung dari kapasitas keuangan yang dimilikinya (Halim, 2003, 2004). Otonomi daerah dilihat dari segi anggaran mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah tersebut terutama diperoleh dari dana perimbangan yang komponennya terdiri dari : dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) (Dewa, 2010).

Peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut

(Halim, 2017). Hal demikian sejalan dengan salah satu fungsi APBD yaitu fungsi alokasi yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yani (2009) mengemukakan bahwa peranan alokasi untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu peranan pemerintah.

Indikator kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dengan pendekatan indikator moneter dan non moneter (Arsyad, 2004). Indikator moneter mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendekatan pendapatan per kapita. Sedangkan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan Indikator non moneter mengacu pada suatu indeks yang telah dikembangkan oleh United Nations for Development Program (UNDP) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) (Tamin, 2002). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah : (1) tingkat harapan hidup; (2) tingkat meluk huruf; dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masyarakat. Selain itu aspek penting kesejahteraan adalah terbebasnya masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat (Suradi, 2016). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Indikator kemiskinan mencerminkan banyak masalah pembangunan seperti pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Keuangan daerah yang kuat diharapkan dapat mengatasi atau mengurangi kemiskinan (Remi, dkk, 2002).

Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis, potensi dan kemampuan keuangan daerah yang sangat bervariasi. Data-data umum tentang APBD menunjukkan adanya kenaikan pendapatan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Kondisi seperti ini semestinya sejalan dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang makin meningkat pula. Namun demikian dalam kenyataannya kesejahteraan yang dicerminkan melalui pendapatan per kapita per tahun, Indeks Pembangunan Manusia tidak sejalan dengan pertumbuhan anggaran APBD, bahkan angka kemiskinan masih relatif tinggi.

Uraian di atas menggambarkan bahwa peningkatan keuangan daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan oleh PDRB per kapita dan IPM serta kemiskinan, sehingga timbul pertanyaan menarik tentang "Bagaimanakah model keterkaitan keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat", dalam dimensi geografi, variasi ruang tentang potensi wilayah dan

kemampuan keuangan daerah juga memberikan implikasi menarik tentang strategi pengalokasian anggaran belanja publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spasial.

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan memperjelas pola hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kabupaten-Kota Provinsi Jawa Tengah. Secara lebih rinci hal ini dapat dijabarkan dalam tujuan penelitian adalah (1). Mengidentifikasi tingkat kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten-Kota Provinsi Jawa Tengah. (2) Analisis variasi keruangan dan regionalisasi tingkat kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (3).Menyusun tipologi pola hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat (4).Menyusun prioritas wilayah dalam rangka optimalisasi keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota. Wilayah-wilayah Kabupaten-Kota tersebut memiliki variasi kondisi geografis dan lingkungan fisik yang bervariasi, yang mengakibatkan karakter sosial ekonomi dan lingkungan serta perkembangan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Dalam kajian geografi pembangunan, perbedaan atau variasi spasial (*areal differentiation*) ini merupakan kajian yang menarik dan sebagai dasar regionalisasi. Unit analisis yang digunakan dalam studi ini adalah Kabupaten-Kota dengan menggunakan data tahun 2018. Secara umum, penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kuantitatif berbasis analisis data sekunder yang mencakup rincian dari peubah-peubah keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peubah-peubah tersebut diturunkan melalui kajian pustaka dan secara operasional diperoleh dari sumber data seperti Kabupaten/Kota Dalam Angka, Provinsi Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto, Statistik Keuangan Daerah dan Statistik Kesejahteraan. Beberapa indikator dan variabel penelitian disajikan pada tabel 1.

Data atau variabel yang diperoleh dianalisis melalui 4 (tiga) tahapan, yaitu : penentuan variabel, penyusunan indeks kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Klasifikasi. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik tentang hubungan antar indikator dan perbedaan antar ruang, dan model regresi linier serta didukung oleh teknik pemetaan (Muta'ali, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan diantaranya penyusunan indeks komposit keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan Z-score, tipologi wilayah berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat (tabel 2).

Tabel 1. Indikator dan Variabel Penelitian

Indikator	Variabel
Keuangan Daerah	
Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Jumlah Pendapatan Daerah
Pengeluaran daerah	Pengeluaran Hibah Pengeluaran Dana Sosial Pengeluaran Pembangunan
Efisiensi	Rasio perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan
Kesejahteraan Masyarakat	
Kesejahteraan Masyarakat	Indek Perumahan (dihitung dari 7 karakteristik rumah) Pendapatan per kapita, Informasi teknologi (Kepemilikan HP dan Komputer), Kemiskinan, Pengangguran Angka sakit, Pendidikan

Table 2.Indek komposit keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Keuangan Daerah Tinggi	Keuangan Daerah Rendah
Kesejahteraan Tinggi	1	2
Kesejahteraan Rendah	4	5

Selain tipologi di atas, juga dilakukan analisis kuantitatif statistik komparasi-relasi dengan menggunakan Analisis Varian, Korelasi, dan Regresi Linier Berganda, serta regionalisasi dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi. Dalam penelitian ini juga dilakukan penyusunan model hubungan antar kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam model tersebut, Kesejahteraan Masyarakat diletakkan sebagai serta menentukan faktor regional penentu tingkat kesejahteraan variabel terpengaruh (Y), dan variabel pengaruh yang berasal dari variabel-variabel keuangan daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 \dots \dots \beta_n X_n$$

Keterangan

Y = Indek Kesejahteraan Masyarakat

a = koefisien intersep

$\beta_1 \dots \beta_n$ = koefisien variabel $X_1 \dots X_n$.

X_1 = Pendapatan daerah/kapita

X_2 = Kemandirian Daerah (Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD))

- X_3 = Belanja Hibah dan bantuan Sosial
 X_4 = Belanja Pembangunan
 X_5 = Efisiensi keuangan (Rasio pengeluaran dan pendapatan)

Tahap akhir adalah penentuan prioritas manajemen keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis kemampuan keuangan daerah diperoleh dari data Keuangan Daerah (BPS, 2018) yang selanjutnya dipilih enam indikator yang relevan. Rata-rata total pendapatan daerah (Juta) Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2,1 Trilyun, dimana sebagian besar (48,57%) memiliki pendapatan antara 2,5-2 Trilyun. Kabupaten dengan pendapatan terbanyak adalah Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Cilacap yang lebih dari 3 Trilyun. Jika pendapatan daerah tersebut diperbandingkan dengan jumlah penduduk, maka rata-rata tiap penduduk mendapatkan Rp 2.506.976, dimana terdapat lima kabupaten yang memiliki nilai lebih dari Rp. 3.000.000 yaitu Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan.

Indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah adalah tingkat kemandirian yaitu persentase PAD baik terhadap dana perimbangan ataupun terhadap total pendapatan. Rata-rata PAD Kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 19% dari total pendapatan, terdapat sembilan daerah memiliki persentase lebih dari 20% yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga, Sukoharjo, Cilacap, Kota Pekalongan, Karanganyar bahkan untuk Kota Semarang memiliki nilai PAD yang sangat besar yaitu 45,20%.

Selain pendapatan daerah, kinerja kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran (Yuliani, 2013). Dari banyak jenis pengeluaran, diambil dua jenis pengeluaran yang relevan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu pengeluaran untuk belanja sosial dan belanja pembangunan. Pengeluaran belanja untuk hibah dan dana sosial dalam pengeluaran daerah sangat kecil dengan rata-rata 2,16% dari pengeluaran pembangunan, pengeluaran sosial tinggi terdapat di enam Kabupaten Kota yaitu Kota Surakarta, Karanganyar, Batang, Temanggung, Magelang dan Rembang. Sedangkan 57% memiliki pengeluaran sosial kurang dari 2%. Hal yang sama terjadi pada pengeluaran untuk pembangunan dimana hampir 80% kabupaten kota memiliki pola pengeluaran pembangunan <50%, yang artinya sebagian besar pengeluaran untuk belanja rutin pegawai sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap masyarakat.

Jika dinilai nilai efektivitas keuangan daerah dengan membandingkan pengeluaran dengan pendapatan, maka hampir separuh kabupaten kota dalam kondisi surplus (51%), pengeluaran masih dibawah pendapatan, sedangkan

sisanya pengeluaran melampaui pendapatan mereka sehingga defisit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kota Provinsi Jawa tengah

Indikator Keuangan Daerah	Klasifikasi dan Rata-rata	Kabupaten Kota	
		Jumlah	(%)
Total pendapatan (Juta)	2.130.911		
Tinggi	>2.500.000	7	20,00
Sedang	2.500.000-2.000.000	17	48,57
Rendah	< 2.000.000	11	31,43
Pendapatan daerah/ Kapita (Rp)	2.506.976		
Tinggi	>3.000.000	5	14,29
Sedang	2.000.000-3.000.000	19	54,29
Rendah	<2.000.000	11	31,43
PAD (%)	19,0		
Tinggi	>20	9	25,71
Sedang	15-20	17	48,57
Rendah	<15	9	25,71
Belanja Sosial (%)	2,16		
Tinggi	>3	6	17,14
Sedang	2-3	9	25,71
Rendah	<2	20	57,14
Belanja Pembangunan (%)	40,95		
Tinggi	>50	6	20,00
Sedang	35-50	16	48,57
Rendah	<35	11	31,43
Efektifitas (Rasio Pengeluaran dan Pendapatan)	1		
Surplus	<1	18	51
Defisit	>1	17	49

Sumber : Hasil analisis

Kesejahteraan Masyarakat

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan tujuh indikator yaitu pendapatan/kapita, penduduk miskin, pengangguran terbuka, angka sakit, tingkat pendidikan, informasi teknologi dan indek perumahan yang merupakan gabungan dari tujuh sub indikator. Daerah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat akan ditandai dengan tingginya pendapatan per kapita, rendahnya penduduk miskin (Sutrisno, 1995), pengangguran terbuka (Simanjuntak, 2000), angka sakit dan pendidikan rendah serta tingginya akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi.

Pada indikator pendapatan per kapita, rata-rata Kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pendapatan sebesar Rp. 26 juta per tahun, empat diantaranya memiliki pendapatan sangat tinggi melebihi Rp 55 juta yaitu Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Cilacap. Sebagai kota industri (kretek), kusus memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Jawa Tengah disusul dua kota besar yaitu Kota Semarang dan Surakarta serta Kabupaten Cilacap yang disumbang oleh besarnya nilai Minyak dan Gas. Pendapatan perkapita tinggi tidak menghilangkan fenomena kemiskinan di Jawa Tengah, dibuktikan dengan 73% Kabupaten Kota masih memiliki angka kemiskinan >10%, bahkan delapan wilayah yaitu Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, dan Banyumas memiliki angka kemiskinan >15%. Kemiskinan terjadi akibat adanya tingkat pengangguran yang relatif tinggi, dimana dari 35 Kabupaten Kota, enam diantaranya memiliki angka pengangguran tinggi (>6%) yaitu Kota Tegal, Brebes, Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang, dan Cilacap.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diindikasikan dengan tingginya kualitas kesehatan dan pendidikan. Rata-rata tingkat sakit mencapai 14,97%, dan 17 Kabupaten kota (49%) memiliki tingkat sakit lebih dari 15%, bahkan terdapat dua Kabupaten dengan angka sakit lebih dari 20% yaitu Kabupaten Brebes dan kota Tegal. Indikator pendidikan menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan disebabkan hampir 56% penduduk tidak sekolah, sekolah SD dan tamat SD (pendidikan terdah). Angka rata-rata pendidikan dibawah SD adalah 32%. Terdapat sembilan Kabupaten (25,71) yang memiliki kualitas pendidikan rendah karena >35% penduduk berpendidikan dibawah SD yaitu Kabupaten Brebes, Wonosobo, Purbalingga, Kota Tegal, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, dan Rembang.

Indek kualitas rumah yang diukur dari kepemilikan rumah, ukuran, dan bahan rumah baik dinding, lantai, atap, maupun fasilitas sanitasi rumah menunjukkan kondisi yang relatif cukup baik. Semakin tinggi indek, semakin baik kualitasnya dan terdapat 12 Kabupaten Kota yang indeknya lebih dari 60, yaitu Blora, Banjarnegara, Purworejo, Grobogan, Magelang, Wonosobo, Kota Surakarta, Kendal, Rembang, Temanggung, Pemalang dan Jepara. Indikator terakhir adalah akses rumah tangga terhadap informasi teknologi yang diukur dari kepemilikan HP dan Komputer yang rata-rata sebesar 21,67%. Hanya empat daerah yang memiliki nilai >40 rumah tangga memiliki akses mudah khususnya di daerah perkotaan yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang. Sebaliknya terdapat enambelas kabupaten yang memiliki nilai terendah. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah dirangkum pada tabel 4.

Indikator kedua adalah jumlah objek kejahatan, terjadi 2.654.802 penduduk yang mengalami atau sebagai objek

Tabel 4 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

Indikator Kesejahteraan Masyarakat	Klasifikasi dan Rata-rata	Kabupaten Kota	
		Jumlah	(%)
Pendapatan/kapita (Juta)	Rp. 26,96		
Tinggi	>55	4	11,43
Sedang	20—50	12	34,29
Reandah	<20	19	54,29
Penduduk Miskin (%)	12,49		
Tinggi	>15	8	22,86
Sedang	10-15	18	51,43
Reandah	<10	9	25,71
Pengangguran Terbuka (%)	4,54		
Tinggi	>6	6	17,14
Sedang	4-6	13	37,14
Reandah	<4	16	45,71
Angka Sakit (%)	14,97		
Tinggi	>20	2	5,71
Sedang	15-20	15	42,86
Reandah	<15	18	51,43
Pendidikan (% Penduduk dibawah SD)	32		
Tinggi	> 35	9	25,71
Sedang	25-35	11	31,43
Rendah	<25	15	42,86
Indek Permukiman (Indek)	52		
Tinggi	>60	12	34,29
Sedang	40-60	12	34,29
Reandah	<40	11	31,43
Informasi Teknologi (% telpon, Internet, HP)	21,67		
Tinggi	>40	4	11,43
Sedang	15-40	15	42,86
Reandah	<15%	16	45,71

Sumber : Hasil analisis

kejahatan di Indonesia dengan rata-rata per tahun dari 34 daerah penelitian adalah 7.789. per provinsi per tahun. Rangking Lima Provinsi dengan objek kejahatan terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Besarnya objek kejahatan berbenading lurus dengan jumlah penduduk, dikarenakan lima provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar. Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kejadian kriminalitas terbesar, menuduki posisi keenam, namun tetap tertinggi di Pulau Sumatera. Sebaliknya provinsi dengan objek kejahatan

terendah (diluar daerah pemekaran baru) adalah Maluku, Gorontalo, Kepulauan Riau.

Berdasarkan tabel tersebut separuh atau 11 Provinsi berada pada tipe JPOK dan JPK rendah, demikian pula untuk yang rendah dan sedang (lihat diagonal dalam tabel di atas. Dengan demikian, semakin tinggi peristiwa kejahatan yang terjadi disuatu wilayah, maka akan diikuti dengan jumlah penduduk yang menjadi objek kejahatan yang juga semakin besar

Variasi Spasial Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan analisis sebelumnya, daerah kota menunjukkan kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan yang lebih unggul dibandingkan Kabupaten. Dengan menggunakan analisis ANOVA, diuji ada tidaknya perbedaan indikator-indikator keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya indek kompositnya. Berdasarkan hasil analisis ANOVA, menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (signifikan) indikator-indikator keuangan daerah dan kesejahteraan antara Kabupaten dan Kota selengkapnya lihat tabel 5.

Tabel 5. Analisis ANOVA, Perbedaan Komponen Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat antara Kota dan Kabupaten

Variabel	F	Sig
Keuangan Daerah		
X1=Pendapatan Daerah/Kapita	34.192	.000
X2=Kemandirian	46.510	.000
X3=Pengeluaran sosial	.001	.975
X4=Pengeluaran Pembangunan	108.243	.000
X5=Efektifitas	.034	.854
Kesejahteraan Masyarakat		
X6=Indek perumahan	15.166	.000
X7=Pendapatan per kapita	47.272	.000
X8=Informasi teknologi	27.679	.000
X9=Kemiskinan	1.079	.306
X10=Angka sakit	5.548	.025
X11=Pendidikan	34.192	.000
Indek		
Indek Keuangan Daerah	89.431	.000
Indek Kesejahteraan Masyarakat	15.469	.000

Diantara lima aspek keuangan daerah, terdapat empat indikator yang memiliki perbedaan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai $sig < 0,05$ antara tipe wilayah kota dan kabupaten yaitu variabel pendapatan daerah/kapita, kemandirian, pengeluaran pembangunan. Sebaliknya dua indi-

kator menunjukkan kemaan antara tipe daerah kota dan kabupaten yaitu pengeluaran sosial dan efektivitas. Diantara enam indikator kesejahteraan masyarakat hampir semuanya menunjukkan perbedaan signifikan antara kota dan kabupaten dan hanya satu aspek yang tidak berbeda yaitu tingkat kemiskinan. Artinya, fenomena kemiskinan antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan hasil yang sama. Sedikit berbeda dengan analisis antar komponen, jika komponen tersebut dijadikan nilai indeks, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kota dan kabupaten, baik pada indeks keuangan daerah maupun indek kesejahteraan masyarakat.

Model Hubungan Komponen Keuangan daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antar variabel penentu keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di dalam dengan analisis statistik korelasi. Hasil analisis korelasi (korelasi Pearson) antara komponen keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia disajikan dalam tabel 6.

Hasil analisis yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk terdapat hubungan erat antara indikator keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan dominasi hubungan yang bersifat positif. Dari lima indikator keuangan daerah, terdapat satu indikator yang tidak memiliki hubungan dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu pengeluaran sosial. Hal ini menjadi permasalahan khusus mengingat fokus kajian pada kesejahteraan masyarakat.

Tidak ditemukannya relasi antara bantuan sosial dengan indikator kesejahteraan masyarakat disebabkan kecilnya dana sosial yang dialokasikan dalam pengeluaran pembangunan dengan kisaran 1-2%. Indikator-indikator kesejahteraan masyarakat memiliki yang erat baik antar indikator maupun dengan keuangan daerah. Berdasarkan analisis di atas, secara umum keuangan daerah berhubungan kuat dengan variabel kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kuatnya hubungan antara indek kesejahteraan masyarakat dan keuangan daerah (lihat tabel 7).

Indek keuangan daerah memiliki hubungan positif sebesar 0,579 (kuat) dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Jawa tengah, semakin tinggi kemampuan keuangan daerah, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

Model Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara peubah terpengaruh Y (kesejahteraan masyarakat) dengan peubah pengaruh (X=keuangan daerah) baik secara sendiri (korelasi) maupun secara berganda. Secara rinci hasil analisis ini dapat disajikan pada tabel 8.

Tabel 6. Pola Hubungan Antar Variabel penelitian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
X1	1	.369*	-.084	.566**	-.135	.005	.379**	.548**	.351*	.232	.283
X2		1	-.006	.709**	.271	-.209	.706**	.730**	.700**	.205	.386*
X3			1	-.036	.085	-.105	.097	.101	-.024	.214	.125
X4				1	-.041	.032	.564**	.718**	.634**	.001	.250
X5					1	.094	.060	-.140	.210	.304	.343*
X6						1	-.372*	-.228	-.263	-.317	-.288
X7							1	.678**	.625**	.106	.348*
X8								1	.711**	.318	.497**
X9									1	.379*	.763**
X10										1	.812**
X11											1

Keterangan :

X1=Pendapatan Daerah/Kapita, X2=Kemandirian, X3=Pengeluaran sosial, X4=Pengeluaran Pembangunan, X5=Efektifitas, X6=Indek perumahan, X7=Pendapatan per kapita, X8=Informasi teknologi, X9=Kemiskinan, X10=Angka sakit, X11=Pendidikan

Tabel 7. Pola Hubungan Antar Variabel Keuangan dengan Indek Kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah

Hubungan Antar Variabel		Tanpa Bobot	
		Nilai	Sig
		Korelasi	
Y1 = Indek Keuangan Daerah	Y2=Indek kesejahteraan	.579**	.000

Tabel 8. Pola Hubungan Antar Variabel Keuangan dengan Indek Kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah

	Variabel Keuangan Daerah	Indek kesejahteraan (Y1)
X1	Rasio Penerimaan daerah/Kapita	.476**
X2	Kemandirian Daerah (% PAD)	.522**
X3	Pengeluaran Sosial (%)	-.266
X4	Pengeluaran Pembangunan (%)	.306
X5	Efektifitas	.468**

Keterangan :

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Diantara lima variabel keuangan daerah, dia variabel tidak memiliki hubungan dengan indek kesejahteraan, bahkan untuk pengeluaran sosial pola hubungan bersifat negatif, dimana semakin besar keuangan daerah maka persentase pengeluaran untuk sosial semakin kecil. Sebaliknya, tiga variabel lain sangat signifikan berhubungan dengan kesejahteraan (Fajar, 2013).

Ditinjau dari hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi atau koefisien arah persamaan, juga merupakan besarnya pengaruh setiap peubah pengaruh (X) terhadap peubah terpengaruh (Y), jika peubah pengaruh naik atau turun sebesar satu unit. Besarnya nilai koefisien persamaan regresi beserta uji signifikan ditunjukkan pada tabel 9.

Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi yang telah terbakukan yakni nilai Beta yang besarnya juga bervariasi, seperti tersaji pada tabel di atas, maka disusun persamaan garis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,310X1 + 0,400X2 + 0,120X3 + 0,16X4 + 0,274 X5$$

Pada persamaan garis regresi linier berganda tersebut, dapat diartikan bahwa setiap peubah X mempunyai nilai pengaruh bervariasi. Sebagai contoh indikator rasio penerimaan daerah/kapita (X1) mempunyai nilai Beta sebesar -- 0,310, artinya, jika nilai peubah pengaruh lain (X2, X3, X4, X5,) konstan, maka setiap penurunan 1 indeks jumlah penduduk yang terbakukan, berakibat kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,310. Demikian halnya dengan indikator-indikator yang lain. Dengan kenyataan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kelima peubah X tersebut memiliki pengaruh terhadap terjadinya variasi tingkat kesejahteraan di Jawa Tengah. Namun, setiap peubah besar pengaruhnya berbeda-beda. Oleh karena itu untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh tersebut, dilakukan uji signifikansi T terhadap setiap koefisien regresi (nilai Beta).

Hasil uji signifikansi T terhadap koefisien regresi parsial untuk keuangan daerah menunjukkan bahwa dari limas peubah X tersebut, tiga peubah menunjukkan T hitung dengan derajat kepercayaan (*confidence level*) rendah, yakni X1, X2, dan X5 sebesar lebih besar dari 0,01, sedangkan dua variabel memiliki T hitung dengan derajat kepercayaan

Tabel 9. Model Hubungan Regresi Antara Variabel Keuangan Daerah (X) dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

Variabel Keuangan Daerah	Y	
	Indek Kesejahteraan masyarakat	
	Koefisien Nilai Beta	sig
R2 (sumbangan)	.696	
Konstan	131,016	.3940
X1 Rasio Penerimaan daerah/Kapita	.310	.0067
X2 Kemandirian Daerah (% PAD)	.400	.0064
X3 Pengeluaran Sosial (%)	.120	.3760
X4 Pengeluaran Pembangunan (%)	.016	.9445
X5 Efektifitas	.274	.0752

Keterangan :

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

(*confidence level*) tinggi, yakni X3 dan X4. Atas dasar hasil analisis tersebut, maka faktor-faktor yang dianggap berpengaruh nyata (dengan derajat kepercayaan lebih atau sama dengan 95%) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dengan urutan yang paling besar pengaruhnya antara lain: kemandirian daerah (X2), rasio penerimaan daerah/kapita (X1), dan efisiensi anggaran. Dari hasil ini terbukti secara benar bahwa faktor keuangan daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa peubah yang secara sendiri-sendiri mempunyai korelasi kuat dan berpengaruh, ternyata secara bersama-sama juga memiliki pengaruh yang meyakinkan dan konsisten.

Tipologi Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten-kota di Provinsi Jawa Tengah

Bagian esensial dari penelitian ini adalah mendalami tentang pola hubungan antara kemampuan keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis diawali dengan membuat klasifikasi atas data keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat terbagi menjadi empat bagian yaitu kemampuan keuangan dan kesejahteraan sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Indeks dilakukan dengan dengan Z-score, sehingga secara umum daerah dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu di atas rata-rata (nilai positif) dan di bawah rata-rata (nilai negatif). Untuk mendetilkan, maka masing-masing dikelompokkan menjadi dua yaitu sangat tinggi dan tinggi (di atas rata-rata) dan sangat rendah dan rendah (dibawah rata-rata).

Berdasarkan Klasifikasi keuangan daerah, terdapat enam wilayah dengan tingkat keuangan daerah sangat tinggi dimana semuanya merupakan daerah dengan tipe kota. Sedangkan daerah kabupaten yang memiliki klasifikasi tinggi sebanyak delapan Kabupaten yaitu Purbalingga, Magelang, Sragen, Rembang, Kudus, Jepara, Temanggung, Batang. Sedangkan wilayah yang memiliki keuangan daerah sangat

rendah adalah Wonosobo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Blora, Demak, dan Pemalang, selebihnya kategori rendah sebanyak empat belas. Secara spasial dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat sembilan wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tinggi yaitu Semarang, Sukoharjo dan empat Kota Magelang, Semarang, Salatiga, Surakarta.. Kabupaten diluar kluster perkotaan yang memiliki kesejahteraan sangat tinggi adalah Kabupaten Semarang dan Sukoharjo.. Sedangkan wilayah yang kesejahteraan wilayahnya rendah terdapat di hampir sebagian besar Kabupaten dan Kota. Distribusi keruangan relatif merata (Gambar 2).Selebihnya dapat dilihat pada tabel 10.

Mencermati data sandingan tersebut tampaknya ada keterkaitan yang erat antara kemampuan ekonomi daerah dengan kesejahteraan masyarakat, dimana wilayah yang memiliki keuangan daerah yang tinggi juga akan diikuti dengan tingkat kesejahteraan tinggi pula, seperti di Kabupaten Kabupaten di Kota. Hal ini sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu kemampuan keuangan daerah membawa dampak perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

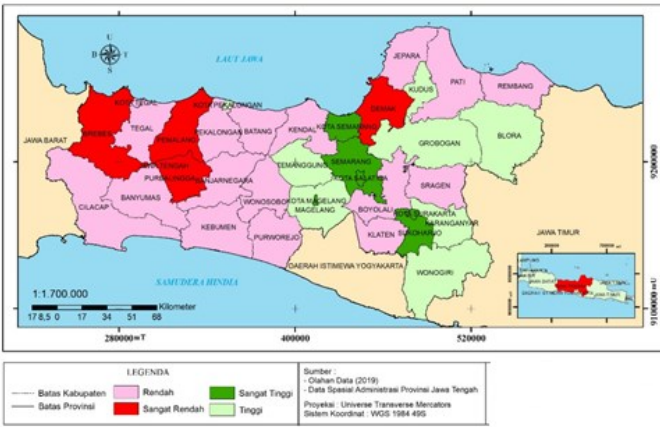


Gambar 1. Peta Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota, Provinsi Jawa Tengah

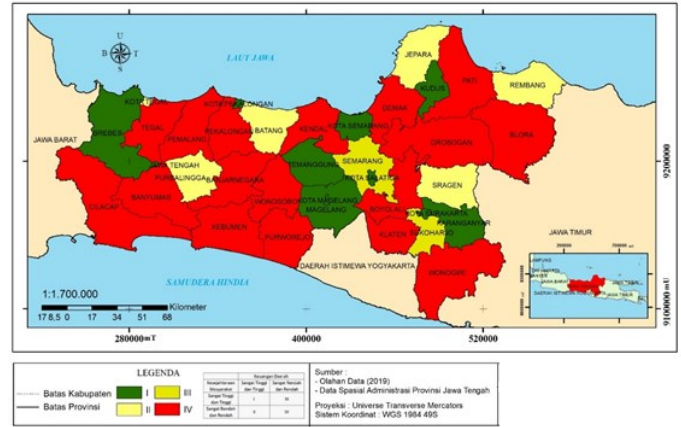
Tabel 10. Klasifikasi Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Povinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Keuangan Daerah			Kesejahteraan Masyarakat		
	Indek	R	Klas	Indek	R	Klas
Cilacap	-0,34	22	R	-0,20	18	R
Banyumas	-0,29	21	R	-0,87	29	R
Purbalingga	-0,07	14	T	-1,26	34	SR
Banjarnegara	-0,13	16	R	-0,59	26	R
Kebumen	-0,23	19	R	-0,91	31	R
Purworejo	-0,88	29	R	-0,04	15	R
Wonosobo	-1,01	31	SR	-0,88	30	R
Magelang	0,14	10	T	0,66	7	T
Boyolali	-0,22	18	R	-0,37	20	R
Klaten	-1,02	32	SR	-0,49	22	R
Sukoharjo	-0,67	25	R	1,56	3	ST
Wonogiri	-1,15	35	SR	0,40	11	T
Karanganyar	0,78	7	SR	0,64	8	T
Sragen	-0,02	13	T	-0,51	23	R
Grobogan	-0,27	20	R	0,16	13	T
Blora	-1,11	34	SR	0,08	14	T
Rembang	0,05	11	T	-0,42	21	R
Pati	-0,85	28	R	-0,67	27	R
Kudus	0,49	8	T	0,47	9	T
Jepara	0,02	12	T	-0,16	17	R
Demak	-0,96	30	SR	-1,04	32	SR
Semarang	-0,13	17	R	1,17	4	ST
Temanggung	0,34	9	T	0,24	12	T
Kendal	-0,84	27	R	-0,27	19	R
Batang	-0,09	15	T	-0,05	16	R
Pekalongan	-0,79	26	R	-0,52	24	R
Pemalang	-1,07	33	SR	-1,07	33	SR
Tegal	-0,38	23	R	-0,75	28	R
Brebes	-0,42	24	R	-1,68	35	SR
Kota Magelang	2,44	2	ST	1,04	6	ST
Kota Surakarta	2,60	1	ST	1,06	5	ST
Kota Salatiga	1,31	5	ST	2,93	1	ST
Kota Semarang	2,01	3	ST	2,46	2	ST
Kota Pekalongan	1,58	4	ST	0,44	10	T
Kota Tegal	1,18	6	ST	-0,20	25	R

Keterangan : Klas=Klasifikasi (SR= Sangat Rendah, R=Rendah, T=Tinggi, dan ST= Sangat Tinggi. R=Rangking.



Gambar 2. Peta Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3. Tipologi Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat) di Indonesia

Tabel 11. Tipologi Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat) di Indonesia

Kesejahteraan Masyarakat	Keuangan Daerah	
	Sangat Tinggi-Tinggi	Rendah-Sangat Rendah
Sangat Tinggi-Tinggi	Magelang, Karanganyar, Kudus, Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan 9 Kab/Kota (25,71%)	Sukoharjo, Semarang, 2 Kab/Kota (5,71%) Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes 6 Kab/Kota (17,14%)
Rendah-Sangat Rendah		

Analisis lanjutan dari hasil korelasi dan regresi adalah menyusun tabel silang dua komponen Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat atau hasilnya berupa pengelompokan (tipologi) relasional. Dalam hal ini masing-masing Kabupaten Kota dikelompokkan ke dalam empat tipe wilayah, hasil tabel silang (*cross tab*) antara dua komponen tersebut sebagaimana ditampilkan dalam tabel 11.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tipe yang paling besar adalah wilayah dengan kesejahteraan rendah dan keuangan rendah (Tipe IV) sebesar hampir separuh 18 kota kabupaten (51,46). Jumlah terbesar kedua adalah wilayah dengan kesejahteraan tinggi dan keuangan tinggi (Tipe I) sebanyak 9 kabupaten kota atau 25,71%. Keberadaan

Tabel 12. Prioritas Pengembangan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Prioritas	Tipe		Jumlah	Provinsi
	KUD	KM		
Pertama	SR_R	ST-T	2 Kab/Kota (5,71%)	Sukoharjo, Semarang
Kedua	ST-T	ST-T	9 Kab/Kota (25,71%)	Magelang, Karanganyar, Kudus, Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan
Ketiga	SR-R	SR-R	18 kab/Kota (51,46%)	Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes

Keterangan KUD Keuangan Daerah), KM (Kesejahteraan Masyarakat)

Kabupaten kota yang berasal dari Tipe I dan IV sebanyak 77%, dikarenakan posisinya diagonal maka memiliki makna terdapat hubungan kuat antara keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (lihat Gambar 3).

Diluar tipe I dan IV merupakan tipe wilayah yang memiliki pola hubungan keuangan daerah dan kesejahteraan yang spesifik. Misalnya Tipe III, biarpun dengan kemampuan keuangan yang rendah ,namun kesejahteraan masyarakatnya tinggi, yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dan Semarang.

Tabel 13. Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provisni Jawa Tengah

Prioritas	Tipe		Jumlah	Provinsi
	KUD	KM		
Pertama	SR-R	SR-R	18 kab/ Kota (51,46%)	Cilacap, Banyumas, Ban- jarnegara, Kebu- men, Purworejo, Wonosobo, Boyo- lali, Klaten, Wono- giri, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Kendal, Pekalon- gan, Pemalang, Tegal, Brebes
Kedua	ST-T	SR-R	6 Kab/ Kota (17,14%)	Purbalingga, Sra- gen, Rembang, Jepara, Batang, Kota tegal

Keterangan KUD (Keuangan Daerah), KM (Kesejahteraan Masyarakat)

Daerah ini menarik untuk dilakukan sebagai percontohan. Sebaliknya tipe II relatif kurang baik, dikarenakan meskipun memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi, namun belum mempengaruhi kondisi kesejahteraan yang baik. Kabupaten yang masuk kategori adalah Purbalingga, Sragen, Rembang, Jepara, Batang, Kota Tegal, Kondisi yang sesuai fakta relational antara keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Manajemen Wilayah: Wilayah Prioritas Pengembangan dan Keuangan Daerah dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Mendasarkan pada hasil analisis korelasi antar komponen dan tabel sebelumnya tentang tipologi hubungan antara keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat disusun skala prioritas penanganan. Keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat memiliki pola hubungan yang positif, maka dapat dikembangkan dua tipe prioritas, yaitu pengembangan keuangan daerah dan penanganan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, wilayah yang memiliki potensi keuangan daerah tinggi menjadi prioritas, demikian pula prioritas penanganan kesejahteraan masyarakat diletakkan pada wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Berikut tabel 12 pengelompokan beserta kabupaten kotanya.

KESIMPULAN

Kondisi keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Wilayah ditandai dengan tingkat kemandirian yang cukup (19%) dan efektivitas yang bervariasi dan berimbang antar daerah. Sedangkan karakter kesejahteraan masyarakat relatif rendah, ditandai dengan masih cukup tingginya

penduduk miskin. Dalam struktur belanja, alokasi untuk kepentingan sosial masih sangat rendah (2%), sehingga sulit diharapkan peningkatan kesejahteraan hanya bergantung pada keuangan daerah, meskipun didapatkan pola hubungan yang positif. Hasil analisis varian menunjukkan tingkat perbedaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat antara Kabupaten dan Kota. Daerah dengan ciri perkotaan memiliki indek keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten

Terdapat hubungan yang erat antara indikator keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi keuangan daerah akan diikuti dengan tingginya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian justru belanja sosial tidak berhubungan dengan kesejahteraan, dikarenakan kecilnya alokasi biaya sosial dalam belanja daerah.

Analisis regresi menunjukkan cukup besar sumbangan (*share*) dari lima peubah pengaruh keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat (kriminalitas). Adapun model persamaan garis regresi berganda pengaruh keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah

$$Y = 0,310X_1 + 0,400X_2 + 0,120X_3 + 0,16X_4 + 0,274 X_5$$

Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh nyata (dengan derajat kepercayaan lebih atau sama dengan 95%) terhadap rasio penerimaan per penduduk (X_1), tingkat kemandirian daerah (X_2) dan efektivitas belanja pembangunan (X_5)

Model hubungan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat bersifat positif-logis, yang ditandai dengan mengelompoknya 9 Kabupaten/Kota (25,71%) pada tipe I (keuangan tinggi, kesejahteraan tinggi) dan 18 kabupaten/Kota (51,46%) pada Tipe IV (keuangan rendah dan kesejahteraan rendah).

Model ini menghasilkan dua tipe manajemen, yaitu pengembangan keuangan daerah dan prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang memiliki keuangan daerah rendah, namun menghasilkan kesejahteraan tinggi patut dikembangkan, selain yang memiliki ciri-ciri tinggi (tipe I). Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat diprioritaskan pada Tipe IV, dimana keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sama-sama rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2018. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Kabupaten-Kota 2017-2018. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 20017-2018. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. BPS Jawa Tengah. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. BPS Jawa Tengah. Semarang.

- Badan Pusat Statistik. (2018). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun (2018). BPS Jawa Tengah. Semarang.
- Dewa dkk. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Jurnal Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010 DJPK. 2011. Deskripsi dan Analisis APBD 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fajar, Mochamad. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah : Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang .
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 11401159 .
- Halim, Abdul. (2002). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. H.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta : Salemba Empat .
- Muta'ali, Luthfi. (2012). *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Muta'ali, Luthfi. (2015). *Teknik Analisis Regional, untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Remi, Sutystie Soemitro dan Prijono Tjiptaherijanto, (2002). Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia, Jakarta : CV, Rikneka Cipta.
- Simanjuntak, Payaman J. (2000). Produktivitas tenaga Kerja. Jakarta: Grafindo .
- Soetrisno, Loekman, (1995).“Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan”, dalam Awan Setya Dewanta, dkk. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Yogyakarta : Aditya Media.
- Suradi. (2006). Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI .
- Tamin, Faisal, (2002). IPM dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Pembangunan Daerah, Depdagri, Edisi April – Juni 2002. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Todaro. M.P., (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga .
- Yani, Ahmad. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers .
- Yuliani, Indah. (2013). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. Jurnal : Universitas Hasanuddin Makassar.